

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin  
Volume 1, Nomor 6, Juli 2023, Halaman 207-220  
E-ISSN: 2986-6340  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8114755>

## Analisis Penerapan Model Tujuan Rasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Implementasi E-Government Sebagai Realisasi Aksiologi Dalam Administrasi Pemerintahan Daerah

Hasan Al Bana<sup>1</sup>, Nurhaliza Putri<sup>2</sup>, Tasya Dwi Melani<sup>3</sup>, Ditha Linggar Parawansa<sup>4</sup>,  
Alma Wulan Astriasty Lomban Wullur<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Progam Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nasional  
e-mail: <sup>1</sup>[hasanalbana184@gmail.com](mailto:hasanalbana184@gmail.com), <sup>2</sup>[lizaaaptr17@gmail.com](mailto:lizaaaptr17@gmail.com), <sup>3</sup>[tasyadmeleni@gmail.com](mailto:tasyadmeleni@gmail.com),  
<sup>4</sup>[dithalinggar11@gmail.com](mailto:dithalinggar11@gmail.com), <sup>5</sup>[almaastriasty@gmail.com](mailto:almaastriasty@gmail.com)

### Abstrak

Kebijakan dan regulasi dalam meningkatkan efektivitas implementasi *E-Government* merupakan langkah penting bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan aksiologi dalam administrasi pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan kebijakan dan regulasi dapat menjadi pedoman dalam pengembangan dan implementasi layanan *E-Government* yang paling berhasil, hemat waktu, dan cocok dengan tuntutan masyarakat. Dalam penelitian ini, pemerintahan daerah akan dihadapkan oleh sebuah persoalan dalam dimana terdapat implementasi terkait pelaksanaan *E-Government*. Mulai dari strategi hingga perkembangan penerapan implementasi *E-Government* tersebut. Keefektifitas penerapan *E-Government* dalam Pemerintahan Daerah akan dianggap baik jika waktu, biaya, sumber daya, dan tingkat kepuasan masyarakat telah sesuai dengan model tujuan rasional dan mencerminkan nilai-nilai aksiologi dalam administrasi.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Aksiologi, Implementasi, E-Government, Efektivitas

### Abstract

*Policies and regulations in improving the effectiveness of E-Government implementation are important steps for local governments to realize axiology in local governance. This is because policies and regulations can be a guideline in the development and implementation of E-Government services that are effective, efficient, and follow the needs of the community. In this research, the local government will be faced with a problem in which there is an implementation related to the implementation of E-Government. Starting from the strategy to the development of the implementation of the E-Government implementation. The effectiveness of E-Government implementation in Local Government will be considered good if the time, cost, resources, and level of public satisfaction are following the rational goal model and reflect axiological values in administration.*

**Keywords:** Effectiveness, Axiology, Implementation, E-Government.

## PENDAHULUAN

Transformasi dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah tata cara kerja dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya *e-government*, pemerintah dapat memberikan layanan publik secara *online*, seperti pendaftaran penduduk, perizinan, dan pembayaran pajak, yang dapat diakses oleh masyarakat melalui internet tanpa harus datang ke kantor pemerintahan secara fisik. Hal ini mempermudah dan mempercepat proses pelayanan publik serta mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh United Nations (UN) mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2022, Indonesia berhasil naik peringkat menjadi urutan 77 dalam pengembangan dan penerapan sistem tersebut. Hasil ini

menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam hal pengembangan dan implementasi *e-government* di Indonesia, dibandingkan dengan posisi sebelumnya di tahun 2020 yang berada di peringkat 88 dan di tahun 2018 di peringkat 107. Akan tetapi, Indonesia masih memerlukan penguatan infrastruktur telekomunikasi karena memiliki skor rendah dalam hal tersebut. Hal ini dikarenakan belum meratanya pengembangan dan implementasi *e-government* terutama di tingkat daerah. Sebagai entitas yang lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang besar dalam pengembangan *e-government* di Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya dalam penerapan *e-government* dengan memperkuat infrastruktur telekomunikasi.

Dalam hal ini, model tujuan rasional dapat menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik yang berkualitas melalui *e-government*. Model efektivitas tujuan rasional juga didasarkan pada prinsip-prinsip rasionalitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan *e-government* yang mendorong perbaikan kinerja birokrasi dan peningkatan pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi. Model tujuan rasional juga memungkinkan adanya pengukuran dan evaluasi kinerja pemerintah dalam memberikan layanan publik secara efektif dan efisien, karena model ini menekankan pada tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik, maka pemerintah dapat melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap sejauh mana tujuan tersebut telah tercapai.

## TINJAUAN TEORITIS

### E-Government

#### a. Pengertian E-Government

Pertumbuhan global jaringan internet saat ini merupakan tanda kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jumlah pengguna internet telah tumbuh secara signifikan. Karena mudah digunakan dan memungkinkan pertukaran berbagai jenis informasi dengan cepat, internet berkembang dengan cepat. Pemerintah terdorong untuk mulai menggunakan teknologi internet sebagai salah satu media yang kini berkembang sangat pesat, sebagai jawaban atas seruan akan pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

*E-government*, sering dikenal sebagai pemerintahan elektronik, adalah praktik pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyampaikan layanan pemerintah kepada individu, perusahaan, dan organisasi lainnya. *E-government* berupaya untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keterbukaan operasi pemerintah serta akses masyarakat terhadap layanan. Pemerintah elektronik, atau "*E-Government*" adalah metode komunikasi kontemporer antara negara, rakyat, dan pihak berkepentingan lainnya yang memanfaatkan teknologi informasi, khususnya Internet, dengan tujuan meningkatkan standar layanan yang sekarang tersedia.

*E-government*, juga dikenal sebagai pemerintahan elektronik, adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan informasi dan layanan publik serta untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ungkapan "*e-Government*" mengacu pada kapasitas untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan interaksi antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta antara pemerintah dan masyarakat dan bisnis. Semua kegiatan ini dimungkinkan karena adanya teknologi internet yang dapat diakses 24/7. Akan banyak pengembangan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat melalui koneksi internet, sehingga masyarakat dapat berperan aktif mendaftarkan izin secara mandiri, memantau proses penyelesaian, dll.

Menurut Mustopadidjaja (2003), konsep *e-government* dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi berbasis web, komunikasi internet, dan dalam beberapa situasi

digunakan sebagai sarana untuk memudahkan komunikasi dan meningkatkan aksesibilitas pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, sektor bisnis, individu yang sedang mencari pekerjaan, serta pemerintah lainnya, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Peluang untuk mendapatkan, mengatur, dan menggunakan informasi dalam jumlah yang lebih besar dengan benar dimungkinkan oleh pertumbuhan teknologi informasi yang cepat dan kemungkinan penggunaannya yang luas. Untuk mencegah terjadinya miskomunikasi kecanggungan masyarakat Indonesia, pemerintah harus dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada dunia internasional. Penggunaan media elektronik merupakan komponen yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, khususnya transaksi perdagangan. Kesenjangan digital, yang melibatkan isolasi dari kemajuan global karena orang tidak dapat menggunakan informasi, akan dihasilkan dari ketidakmampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan tren global tersebut.

*E-government* saat ini digunakan karena adanya tuntutan masyarakat akan kemudahan akses guna menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas secara merata dan menyeluruh. Kurangnya literasi teknologi masyarakat yang masih di bawah rata-rata akibat kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat menjadi tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah. Meskipun Indonesia telah maju secara teknologi, warganya masih kekurangan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk menggunakan media sosial secara efektif. Pemerintah daerah diharapkan dapat menawarkan kualitas layanan yang luar biasa kepada masyarakat lokal sebagai hasil dari *e-government* ini untuk mempromosikan pembangunan daerah. Standar pelayanan primer yang dimaksud adalah yang membuat pemerintah lebih mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, transisi menuju *e-government* harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Melalui proses transformasi ini, pemerintah akan dapat secara efisien menghilangkan hambatan organisasi dan birokrasi dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Selain itu, dapat membangun jaringan sistem manajemen dan prosedur operasional yang memungkinkan organisasi pemerintah bekerja sama untuk memudahkan masyarakat umum mengakses semua informasi dan layanan yang diamanatkan pemerintah.

Alhasil, struktur yang kita gunakan sekarang juga harus difokuskan untuk memajukan transisi masyarakat menuju masyarakat informasi. Terwujudnya pemerintahan yang jujur, terbuka, dan mampu menjawab seruan perubahan mensyaratkan pemerintah mampu memenuhi tuntutan berbagai masyarakat yang saling berkaitan. Secara khusus, masyarakat menuntut pelayanan publik yang melayani kepentingan masyarakat luas di kawasan, yang dapat diandalkan dan dipercaya, serta mudah berinteraksi.

## **b. Tujuan penerapan E-Government**

*Electronic Government* merupakan suatu mekanisme interaksi modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan dengan memanfaatkan teknologi informasi, bertujuan memperbaiki mutu pelayanan yang telah berjalan menjadi lebih baik.

Pengembangan *e-government* merupakan upaya pengelolaan pemerintahan berbasis menggunakan elektronik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan diatur melalui penciptaan *e-government*. Pemanfaatan teknologi informasi memerlukan 2 (dua) tugas yang saling berhubungan, terutama proses kerja elektronik dan sistem manajemen, serta pengolahan data dan manajemen informasi. Tujuan penerapan *e-government* antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menggunakan teknologi informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelayanan publik dengan memanfaatkan

- teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Menciptakan pemerintahan yang terorganisir, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan mempercepat akses informasi publik dan mempermudah pengawasan oleh masyarakat.
  - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui media elektronik seperti *polling online*, forum diskusi, dan konsultasi publik.
  - e. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi jaringan informasi dan transaksi antar instansi pemerintah dengan kualitas tinggi namun harga terjangkau dalam penyediaan pelayanan publik.
  - f. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik untuk masyarakat yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau.
  - g. Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya pemerintah seperti anggaran dan data kependudukan.

Penerapan sistem *e-government* terutama ditujukan untuk mewujudkan *good governance*, dimana pelayanan publik bersifat terbuka, akuntabel, dan bebas korupsi. Maka, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, *e-government* dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang pelayanan publik seperti perizinan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Praktik pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem pemerintahan dan pelayanan publik dikenal sebagai "sistem e-government". Sistem e-government berkaitan dengan dua aspek dalam pelaksanaannya, yaitu penggunaan teknologi informasi yang memanfaatkan jaringan internet. Sayangnya, pemakaian penggunaan teknologi elektronik selama ini hanya mencakup alat manual yang dipadukan dengan komputer sebagai metode pelayanan di penyelenggara pelayanan publik (Sosiawan 2008).

### **Penerapan Model Efektivitas Tujuan Rasional Dalam Pemerintahan Daerah**

Penerapan model efektivitas tujuan rasional dalam pemerintahan daerah melibatkan langkah-langkah konkret untuk menerapkan model tersebut dalam konteks praktik pemerintahan daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan. Dalam artian, penerapan memiliki makna sebagai tindakan atau perbuatan menerapkan suatu konsep, prinsip, aturan, atau metode dalam praktik atau kehidupan sehari-hari. Secara umum penerapan memiliki arti yang sama dengan implementasi. Kedua kata tersebut mengacu pada proses atau tindakan melaksanakan atau menerapkan suatu kebijakan, konsep, atau rencana ke dalam praktik atau situasi nyata. Istilah "penerapan" dan "implementasi" sering digunakan secara bergantian dan memiliki makna yang serupa. Subarsono dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik mendefinisikan implementasi sebagai aktivitas yang melibatkan penyelesaian pekerjaan dengan menggunakan sarana atau alat tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan dari tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, implementasi melibatkan langkah-langkah konkret yang diambil untuk menerapkan kebijakan, program, atau proyek tertentu dalam konteks nyata.

Dalam penerapan model efektivitas tujuan rasional dalam pemerintahan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan upaya konkret untuk menerjemahkan prinsip-prinsip model tersebut menjadi tindakan nyata dalam sistem pemerintahan yang ada. Meskipun belum ada penelitian khusus yang fokus pada model tujuan rasional dalam konteks pemerintahan daerah, penelitian sebelumnya yang terkait dengan implementasi kebijakan dan program pemerintah dapat memberikan pemahaman yang berguna dalam mengaplikasikan model ini.

Dalam tinjauan ini, dapat disajikan salah satu contoh kasus atau studi empiris yang relevan untuk mengevaluasi penerapan model efektivitas tujuan rasional. Penelitian yang relevan adalah "Efektivitas 'Jogja Smart Service' Terhadap Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta" yang dilakukan oleh Alfi Novriando et al. Meskipun penelitian ini tidak secara khusus membahas model efektivitas tujuan rasional, namun penelitian tersebut masih

memiliki relevansi yang dapat memberikan pemahaman tambahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Jogja Smart Service* telah berhasil dalam memberikan pelayanan publik yang efektif di Kota Yogyakarta.

Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari adanya aturan dan tujuan yang jelas yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015. Peraturan ini menjadi pedoman dalam pengembangan *e-government* di Kota Yogyakarta, dan penerapannya dilakukan melalui peluncuran aplikasi *Jogja Smart Service* sebagai sarana pelayanan publik berbasis teknologi. Selain itu, *Jogja Smart Service* juga berperan sebagai "jembatan" antara masyarakat yang melapor dengan SKPD terkait. Dengan adanya komunikasi langsung, hubungan antara pihak pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dengan baik, memungkinkan tindak lanjut yang cepat dan efektif terhadap laporan yang diterima.

Dengan demikian, melalui contoh implementasi *Jogja Smart Service*, dapat dilihat bagaimana model efektivitas tujuan rasional dapat bekerja dalam praktik pemerintahan daerah. Pentingnya memiliki aturan dan tujuan yang jelas, integrasi dengan SKPD terkait, serta menjalin hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat menjadi aspek penting dalam menerapkan model ini. Dalam penerapannya, model ini dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat di tingkat lokal.

### **Aksiologi dalam Administrasi**

#### **Pengertian Aksiologi Administrasi**

Kata Aksiologi umumnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu "axion" berupa nilai, dan "logos" berupa teori atau ilmu. Dari gabungan kata-kata tersebut, maka aksiologi dapat diartikan sebagai cabang filsafat ilmu yang berfokus untuk membahas nilai-nilai, tujuan, serta manfaat dari sebuah objek ilmu pengetahuan tersebut. Aksiologi hanya mengambil manfaat dari sebuah ilmu pengetahuan agar dapat berguna dan tidak ada yang sia-sia.

Dari sudut pandang ilmu administrasi, Aksiologi menerapkan pemanfaatan ilmu administrasi yang dapat berguna bagi kehidupan masyarakat agar dapat tercipta sebuah kemakmuran dan kesejahteraan yang merupakan perwujudan dari keinginan setiap masyarakat. Selain itu, penerapan Aksiologi dapat menjadikan suasana interaksi yang positif, teratur, dan kondusif antara sesama manusia maupun manusia dengan lingkungannya. Aksiologi dalam ilmu administrasi memegang peran penting dalam mencari kebenaran suatu objek, menelusuri nilai serta manfaat objek administrasi tersebut terkait tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Pemanfaatan kajian aksiologi untuk ilmu administrasi dapat menjadikannya sebagai salah satu sumber pengetahuan yang memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat, proses kerjasama, keaktifan interaksi, serta tujuan yang ingin dicapai merupakan acuan dari ilmu administrasi tersebut.

Dalam ilmu administrasi, tidak hanya melihat nyata atau tidaknya suatu objek administrasi, tidak juga hanya melihat seberapa besar usaha yang dilakukan untuk memperoleh tujuan serta cita-cita administrasi tersebut. Namun, ilmu administrasi dapat berguna untuk manusia agar mereka dapat melihat kebermanfaatannya, serta nilai apa saja yang tidak hanya dapat berguna bagi administrasi itu sendiri, tetapi harus berguna pada bidang kehidupan lain. Ilmu administrasi ini dapat menghasilkan pemikiran, pembuktian, serta hasil pengujian dari suatu tindakan yang telah dilakukan oleh manusia saat ini. Selain itu, hasil dari proses pemikiran, pembuktian, serta pengujian tersebut mungkin dapat menghasilkan suatu ilmu pengetahuan baru yang dapat mendorong perkembangan ilmu administrasi. Oleh karena itu, dapat dinyatakan aksiologi dalam ilmu administrasi juga memiliki peran yang berpengaruh dalam proses serta kelancaran jalannya suatu kegiatan administrasi.

## Faktor Penting Penerapan Aksiologi dalam Meningkatkan Efektifitas Administrasi Publik

Penerapan aksiologi dalam kegiatan administrasi sangat mempengaruhi tingkat keefektifan kegiatan administrasi tersebut, terutama dalam ranah publik. Efektifitas sebuah kegiatan administrasi dapat dilihat dari keberhasilan suatu individu dalam mencapai tujuannya atau tujuan dari organisasinya. Sumber daya manusia merupakan pemeran utama dalam kegiatan administrasi, manusia dalam melakukan kegiatan administrasi tergantung dari pola pikir manusia tersebut. Apabila ia sadar akan pentingnya beretika, tentu akan mempengaruhi sikap yang ia lakukan dan penilaian tentang dirinya bagi orang lain. Dalam hal ini, aksiologi memegang peran penting dalam membangun kesadaran beretika dari dalam diri seorang individu agar ia mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.

Seorang manusia yang menjalankan peran dalam kegiatan administrasi harus mengetahui bentuk kepribadiannya, apakah telah sesuai dengan nilai kehidupan atau perlu ada pengembangan lebih lanjut dalam dirinya. Sebuah kegiatan administrasi tentu memerlukan adanya keserasian antara hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Keserasian tersebut terbentuk dari pribadi manusia itu sendiri, apabila ia mampu membedakan segala sesuatu yang baik atau buruk bagi dirinya, maka ia akan lebih mudah untuk menjalankan kegiatan administrasi tersebut. Dalam hal ini, aksiologi memiliki peran dalam memberi petunjuk kepada manusia untuk selalu memperhatikan nilai dirinya agar dapat berkontribusi secara baik dalam kegiatan administrasi publik. Selain itu, lingkungan dalam ranah administrasi publik juga berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya kegiatan administrasi. Seorang manusia yang menjalankan kegiatan administrasi publik perlu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungannya. Di sini, cakupan lingkungan administrasi publik terbilang sudah luas, kehidupan di era digital saat inilah yang membuat lingkungan tersebut tidak terbatas. Penggunaan sosial media yang baik tentu sangat mempengaruhi perubahan dalam diri manusia untuk menjalankan kegiatan administrasi dengan baik.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Dalam Menganalisis penerapan model tujuan rasional dalam meningkatkan efektivitas implementasi e-government sebagai realisasi aksiologi dalam administrasi pemerintahan daerah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif untuk memahami suatu fenomena atau peristiwa dari sudut pandang subjektif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam mengenai konsep, nilai, pandangan, sikap, dan pengalaman individu atau kelompok dalam konteks sosial atau budaya yang lebih luas.

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dapat dilakukan dalam menganalisis penerapan model tujuan rasional dalam meningkatkan efektivitas implementasi *e-government* sebagai realisasi aksiologi dalam administrasi pemerintahan daerah adalah dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik tentang tingkat efektivitas implementasi *e-government* dan pengaruh model tujuan rasional terhadapnya. Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk menguji keterkaitan antara variabel-variabel yang terlibat dalam studi tersebut.

### Sumber Data

Peneliti memperoleh sumber-sumber data yang dihasilkan dari studi pustaka/studi literatur pada buku "Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi" karya Azhar Kasim. Selanjutnya, peneliti juga membaca jurnal Administrasi Publik, baik secara umum maupun ditinjau dari aspek aksiologi yang digunakan untuk menunjang pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah yang berisi pembahasan terkait E-Government sebagai salah satu sumber pengetahuan bagi peneliti dalam

memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan penyelenggaraan E-Government yang berlaku. Karya terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas juga digunakan oleh peneliti sebagai referensi tambahan untuk melengkapi pembahasan penelitian ini.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode ilmiah Studi Pustaka (*Library Research*) ini melibatkan proses pengumpulan data dan informasi dari sumber yang ada, seperti buku, jurnal, surat kabar, makalah, artikel, seminar, informasi *online*, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen terkait penerapan *e-government* sebagai dasar untuk menulis. Umumnya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan topik penelitian dan sumber data yang spesifik dan terkait dengan masalah yang akan diteliti. Peneliti harus mengidentifikasi topik penelitian secara spesifik dengan memperhatikan kualitas dan validitas. Sumber data yang dapat digunakan dalam studi pustaka antara lain buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen terkait penerapan *e-government*.
2. Mengumpulkan dan mengambil data informasi dari sumber yang relevan dengan topik penelitian melalui teknik membaca.
3. Pemilihan kriteria analisis yang relevan dengan topik penelitian dan sumber data yang digunakan.
4. Evaluasi terhadap sumber data yang digunakan untuk menentukan kualitas dan validitas data, serta untuk memastikan bahwa sumber data yang digunakan sesuai dengan topik penelitian.
5. Menganalisis data informasi yang telah dikumpulkan melalui teknik membaca dengan menggunakan kriteria analisis yang relevan dengan topik penelitian.
6. Menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.
7. Menyusun laporan penelitian yang berisi temuan-temuan penelitian, ringkasan hasil analisis, kesimpulan, dan rekomendasi terkait penerapan *e-government* di pemerintahan daerah.

Selama proses penelitian Studi Pustaka, peneliti harus mampu memperhatikan kredibilitas dan validitas sumber data yang digunakan, serta menerapkan kriteria analisis yang relevan dengan topik penelitian. Dengan metode Studi Pustaka, peneliti dapat mengumpulkan data yang relevan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan penerapan *e-government* di pemerintahan daerah.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, metode analisis isi (*content analysis*) digunakan sebagai teknik untuk menganalisis data. Seperti yang diungkapkan oleh Krippendorff (1993), analisis isi digunakan untuk menghasilkan inferensi yang valid dan dapat direproduksi sesuai dengan konteksnya. Tujuan penggunaan teknik analisis data ini adalah untuk menjaga integritas penelitian dan mengurangi risiko kesalahan interpretasi yang mungkin terjadi karena keterbatasan pengetahuan peneliti atau penulis pustaka. Penyusunan penelitian memprioritaskan prinsip kesederhanaan dan kemudahan . Prinsip ini dipilih dengan mempertimbangkan batasan peneliti dalam melakukan kajian pustaka yang mendalam dan rinci. Menurut Sustanto (2005), Pengecekan antar pustaka dan membaca ulang pustaka, serta memperhatikan komentar dari pembimbing dilakukan untuk menjaga integritas proses penelitian dan mencegah serta mengatasi kemungkinan misinformasi akibat kurangnya pengetahuan peneliti atau kekurangan dalam penulisan pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

### Implementasi *E-Government* dalam Pemerintahan Daerah

Beberapa persoalan yang dihadapi dalam pengimplementasian *E-Government* dalam Pemerintah Daerah antara lain adalah:

#### a. Infrastruktur dan Teknologi

Keberhasilan *E-Government* sangat bergantung pada infrastruktur dan teknologi yang tersedia. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur dan teknologi yang memadai, sehingga mempengaruhi implementasi *E-Government*. Berdasarkan beberapa data, hanya sedikit wilayah di Indonesia yang memiliki koneksi internet yang memadai, khususnya di wilayah rural dan terpencil. Berikut adalah beberapa data terkait kurangnya akses internet dari masalah infrastruktur dan teknologi dalam konteks penerapan *E-Government* di tingkat Pemerintah Daerah :

- 1) Menurut laporan "Indonesia ICT Outlook" yang dipublikasikan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2021. Persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses internet hanya 37%. Persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai sekitar 50% menunjukkan bahwa akses internet di daerah pedesaan dan tertinggal masih sangat terbatas.
- 2) Berdasarkan data yang publikasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021, hanya sekitar 42% desa di Indonesia yang telah terhubung dengan jaringan internet. Di Provinsi Papua, angka ini bahkan lebih rendah, yaitu hanya sekitar 14%.
- 3) Kurangnya infrastruktur dan teknologi yang memadai masih menjadi masalah utama dalam penerapan *E-Government* di tingkat Pemerintah Daerah di Indonesia. Investasi dalam infrastruktur dan pelatihan teknis bagi pegawai pemerintah dan masyarakat akan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesiapan dan partisipasi dalam penggunaan layanan *E-Government*.

#### b. Kurangnya Ketersediaan SDM

Kurangnya ketersediaan SDM yang memadai menjadi persoalan yang dihadapi dalam pengimplementasian *E-Government* di Pemerintah Daerah. Masalah ini terkait dengan kurangnya keterampilan dan pengetahuan pegawai pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi, serta kurangnya pelatihan dan dukungan teknis yang memadai. Beberapa faktor yang menyebabkan persoalan ini antara lain :

- 1) Keterbatasan anggaran untuk pelatihan, Banyak daerah di Indonesia mengalokasikan anggaran yang terbatas untuk pelatihan dan pengembangan SDM, termasuk pelatihan dalam penggunaan teknologi informasi. Sehingga, pegawai pemerintah di daerah-daerah tersebut kesulitan untuk mengembangkan dan memanfaatkan keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi.
- 2) Tingginya tingkat pergantian pegawai di beberapa daerah menyebabkan sulitnya pemeliharaan keterampilan pegawai pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi. Keterampilan yang diperoleh oleh pegawai lama mungkin tidak dapat ditransfer kepada pegawai baru secara efektif.
- 3) Pegawai pemerintah di daerah yang berbeda-beda memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang berbeda dalam penggunaan teknologi informasi. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan pegawai dalam mengembangkan dan mengimplementasikan layanan *E-Government* secara efektif.

Dengan mengambil beberapa langkah tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mengatasi masalah kurangnya ketersediaan SDM yang memadai dan meningkatkan efektivitas implementasi *E-Government* sebagai realisasi aksiologi dalam administrasi pemerintahan daerah.

#### c. Keterlibatan Pihak Terkait

Keterlibatan pihak terkait, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk keberhasilan implementasi E-Government. Tidak semua pihak terkait memiliki kesadaran dan keinginan yang sama untuk melaksanakan *E-Government*.

d. Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan dan regulasi dalam meningkatkan efektivitas implementasi *E-Government* merupakan langkah penting bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan aksiologi dalam administrasi pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan kebijakan dan regulasi dapat menjadi pedoman dalam pengembangan dan implementasi layanan *E-Government* yang berdampak positif, hemat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa contoh kebijakan dan regulasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah antara lain membuat undang-undang dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan *E-Government*, membuat standar teknis dan kriteria penilaian, mengembangkan kerangka kerja dan pedoman, memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai pemerintah dan pengembang *E-Government*, serta menjalin kerjasama dengan pihak terkait. Dengan adanya kebijakan dan regulasi yang tepat, implementasi E-Government dapat menjadi lebih efektif dan dapat membantu mengatasi berbagai kendala dan tantangan dalam pengembangan dan implementasi layanan *E-Government*.

*E-Government* dapat membawa banyak manfaat bagi pemerintah daerah, seperti peningkatan efisiensi, pelayanan publik yang lebih baik, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang lebih besar. Namun, ada beberapa strategi yang perlu dipertimbangkan untuk mengimplementasikan *E-Government* secara efektif di pemerintahan daerah, antara lain:

- a. Membuat rencana strategis *E-Government* yang jelas. Pemerintah daerah harus memiliki rencana strategis *E-Government* yang terperinci dan jelas, yang mencakup tujuan, sasaran, indikator, dan *roadmap* untuk pengimplementasian *E-Government*.
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Pelatihan dan peningkatan kemampuan dalam teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang sangat penting bagi staf pemerintah daerah guna memastikan efektivitas penggunaan E-Government
- c. Memperbaiki infrastruktur teknologi informasi. Memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang memadai tersedia dan terpasang di seluruh pemerintah daerah.
- d. Menciptakan aplikasi E-Government yang sesuai dengan keperluan masyarakat. Pemerintah daerah perlu membangun aplikasi *E-Government* yang memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti sistem informasi manajemen administrasi, layanan perizinan *online*, sistem informasi geografis, dan portal informasi publik.
- e. Meningkatkan keamanan informasi. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa sistem *E-Government* yang digunakan aman dan dilindungi dari ancaman keamanan informasi.
- f. Mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dapat dilakukan dalam pelaksanaan *E-Government*, seperti pengembangan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi.

Hingga saat ini penerapan *E-Government* dalam pemerintahan daerah di Indonesia masih tidak seragam dan bergantung pada setiap daerah. Beberapa daerah telah mengadopsi teknologi *E-Government* dalam pengelolaan administrasi publik, seperti sistem informasi manajemen kepegawaian, e-procurement, e-tax, e-budgeting, dan lain sebagainya. Namun, masih banyak daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi teknologi ini.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2019, tingkat kesiapan *E-Government* daerah di Indonesia masih rendah dengan rata-rata skor 50,9 dari skala 100. Masih banyak kendala dalam penerapan *E-Government*, seperti keterbatasan infrastruktur, keterbatasan SDM yang mampu mengoperasikan teknologi, serta kurangnya dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai.

Namun demikian, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerapan *E-Government* di daerah melalui berbagai program dan kebijakan, seperti inisiatif Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Kota (PNPM-Mandiri), Program

Indonesia Digital Economy (IDE), dan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Selain itu, pemerintah juga mengadopsi kebijakan *Smart City* untuk mendorong percepatan implementasi teknologi di berbagai sektor publik.

Secara keseluruhan, penerapan implementasi *E-Government* di Indonesia masih memerlukan upaya lebih lanjut dari berbagai pihak agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mencapai tujuan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

### Efektivitas implementasi E-Government dalam Pemerintahan Daerah

Model tujuan rasional dalam E-Government didasarkan pada pemikiran bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi membantu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi waktu, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam model ini, diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, sehingga hasilnya menjadi lebih baik dan efektif dalam pelayanan publik. Model tujuan rasional dalam *E-Government* dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui beberapa cara, antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi waktu: Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik. Misalnya, dengan adanya sistem online, masyarakat dapat mengajukan permohonan layanan publik tanpa datang ke kantor pemerintah, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengurus permohonan tersebut dapat dikurangi secara signifikan.
2. Mengurangi biaya: Dalam model tujuan rasional, penerapan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat membantu mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik. Misalnya, dengan adanya sistem *online*, biaya operasional untuk pengiriman surat dan pemrosesan dokumen dapat dikurangi secara signifikan.
3. Meningkatkan efisiensi sumber daya: Penerapan teknologi informasi dan komunikasi membantu dalam ditingkatkannya efisiensi penggunaan SDM dan sumber daya lainnya. Misalnya, dengan adanya sistem *online*, pegawai pemerintah dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya yang tersedia dengan lebih efektif dan efisien, karena tidak perlu lagi melayani masyarakat secara langsung di kantor pemerintah.
4. Meningkatkan kepuasan masyarakat: Model tujuan rasional juga menekankan pentingnya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan adanya sistem online, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan publik, hal tersebut berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang diberikan.

Dalam menerapkan model tujuan rasional dalam E-Government, beberapa hal yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Pemahaman yang baik tentang kebutuhan masyarakat

Sebelum memulai pengembangan *sistem E-Government*, pemerintah harus memahami dengan baik kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui survei atau pengumpulan data dari masyarakat terkait dengan layanan publik yang paling dibutuhkan. Dengan memahami kebutuhan masyarakat, pemerintah dapat mengembangkan sistem *E-Government* dengan memberikan manfaat yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Desain sistem yang efektif dan efisien

Dalam merancang sistem *E-Government* harus dilakukan dengan efektif dan efisien, hal tersebut bertujuan memberi pelayanan yang berkualitas dan memuaskan bagi masyarakat. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti keamanan data, infrastruktur teknologi, kecepatan akses, serta keterjangkauan biaya.

### 3. Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat

Pemerintah harus menyediakan forum yang terbuka dan transparan bagi masyarakat dalam memberi masukan dan saran mengenai pengembangan sistem *E-Government*. Hal ini akan memastikan bahwa sistem *E-Government* yang dikembangkan sudah sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal.

### 4. Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat

Pemerintah harus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan sistem *E-Government*. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan sistem *E-Government* dengan baik dan memaksimalkan manfaat yang diberikan oleh sistem tersebut.

### 5. Memastikan keamanan dan privasi data

Sistem *E-Government* harus dirancang dengan memastikan keamanan dan privasi data masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem *E-Government* dapat melindungi data masyarakat dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, penerapan model tujuan rasional dalam *E-Government* dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, hal tersebut berpengaruh dalam peningkatan efektivitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah

## Realisasi aksiologi dalam implementasi E-Government Pemerintahan Daerah

Aksiologi merupakan ilmu yang berisikan nilai atau prinsip moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks implementasi E-Government Pemerintahan Daerah, realisasi aksiologi dimaknai sebagai implementasi nilai moral dan etika dalam pengembangan hingga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperbaiki pelayanan publik. Penerapan model tujuan rasional dalam E-Government yang mencerminkan nilai-nilai aksiologi dalam administrasi dapat dilakukan melalui beberapa cara.

Cara pertama merupakan transparansi, penerapan model tujuan rasional dalam *E-Government* yang mencerminkan nilai-nilai aksiologi dalam administrasi harus dilakukan dengan transparansi. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah dan terbuka ke informasi-informasi publik terkait dengan sistem *E-Government*. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip-prinsip yang rasional dan etis. Cara kedua merupakan akuntabilitas, model tujuan rasional dalam *E-Government* yang mencerminkan nilai-nilai aksiologi dalam administrasi juga harus didukung oleh prinsip akuntabilitas. Artinya, pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sistem E-Government harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan mereka terhadap masyarakat secara terbuka dan transparan. Selanjutnya cara ketiga merupakan keterbukaan, Sistem *E-Government* yang menerapkan model tujuan rasional yang mencerminkan nilai-nilai aksiologi dalam administrasi harus memastikan keterbukaan terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa sistem *E-Government* yang dikembangkan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terakhir adalah kepedulian terhadap hak asasi manusia. Penerapan model tujuan rasional dalam *E-Government* yang mencerminkan nilai-nilai aksiologi dalam administrasi harus didukung oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa sistem *E-Government* harus didesain dengan memperhatikan hak asasi manusia, sehingga tidak melanggar privasi dan kebebasan masyarakat.

## KESIMPULAN

Semakin lama kemajuan IPTEK di seluruh dunia semakin berkembang. Seluruh aktivitas kehidupan manusia dapat dimudahkan oleh IPTEK, termasuk bidang pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan kini sudah mengikuti perkembangan zaman dimana banyak inovasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memudahkan seluruh kegiatan publik, salah satunya dengan menerapkan program E-Government yang memanfaatkan perkembangan IPTEK berupa teknologi komunikasi dan informasi untuk memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah. Dengan adanya program *E-Government* maka layanan pendaftaran penduduk, perizinan, pembayaran pajak, serta pelayanan akses kesehatan dapat diakses oleh masyarakat dengan waktu yang tidak terbatas.

Namun, dikarenakan fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh Indonesia masih cukup rendah, maka program *E-Government* lebih aktif di daerah-daerah terjangkau, seperti pusat kota sehingga dapat diakses oleh penduduk sekitar. Sementara, pemerintah di daerah-daerah terpencil sulit untuk memanfaatkan program *E-Government* ini. Penerapan program *E-Government* di lingkup daerah masih belum merata. Untuk mengupayakan peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah terhadap program *E-Government*, maka terdapat suatu model tujuan rasional yang menjadi landasan pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan kepada publik. Model tujuan rasional dalam *E-Government* ini merupakan penerapan teknologi, informasi, dan telekomunikasi bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan upaya konkret dalam melayani publik dengan baik.

Selain itu, terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam aspek aksiologi yang menjadikan pemerintahan daerah memiliki kesempatan untuk mengembangkan penerapan model tujuan rasional terhadap program *E-Government* bagi masyarakat agar dapat mengembangkan model tujuan rasional tersebut. Nilai-nilai aksiologi ini dapat memberikan implementasi terhadap nilai moral dan etika bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi, informasi, dan telekomunikasi. Selain itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, karena dalam penerapan model tujuan rasional dalam *E-Government* tidak diperkenankan untuk melanggar privasi orang lain dan memperbolehkan kebebasan dalam berpendapat.

## SARAN

Pemerintah telah membuat program *E-Government* untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan publik yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi masyarakat terhadap pelayanan publik tersebut. Namun, peningkatan program *E-Government* oleh pemerintah pusat saja belum cukup untuk membantu masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

Selain itu, Pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur dalam bidang teknologi, komunikasi, dan informasi yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung dalam menyukseskan program *E-Government* yang dapat melayani masyarakat. Penerapan model tujuan rasional sebenarnya dapat membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan hal tersebut.

Upaya pemerintah yang konkret tentu dapat bermanfaat bagi pelayanan publik pada *E-Government* itu sendiri. Selain itu, tidak hanya pemerintah daerah saja, namun pemerintah pusat juga harus memperhatikan nilai-nilai aksiologi dalam penerapan model tujuan rasional terhadap *E-Government* agar dapat mengevaluasi serta meningkatkan program *E-Government* tersebut.

## Referensi

- Achmad Mahmud. (2008) System Model Operasional. Edisi 11, Penerbit: Graha, Jakarta.  
Busro, M. (2018). Teori-teori manajemen sumber daya manusia. Prenada Media.  
Kasim, A. (1993). Pengukuran efektivitas dalam organisasi. Jakarta: LPFE-UI.  
Krippendorff, K. (1991). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage publications.  
Mardiasmo (2017), Perpajakan Edisi Terbaru 2017, Andi: Bandung.

- Mooney, J. D., & Reiley, A. C. (1939). *The Principles of Organization*.
- Perrow, C. (1969). *Birth Of Tolerance In Soviet-Union*.
- Suandi, E. dalam Tarumasely, Y. (2022). *Buku Ajar Perencanaan Pembelajaran* (Vol. 1). Academia Publication.
- Wrightstone, dkk dalam Ngalim Purwanto. (2000). *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Remaja Rosdakarya. Bandung
- Aesong, Y. D. *Penerapan Electronic Government dalam Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah*.
- AFRIANI, V. N. (2022). Efektivitas Implementasi E-Government Terhadap Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Bogor. *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62212>
- Al-Karaghoul, W., & Reast, J. D. (2016). E-government implementation: A review of the literature. In *Proceedings of the 17th Annual Conference on Information Technology Education*.
- Andi, A. (2020). Pemanfaatan E-Government Dalam Tatakelola Pemerintahan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalay. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 236-243. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i2.3599>
- Darmawan, E., & Suharto, E. (2019). The effectiveness of e-government implementation in Indonesia. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1387, No. 1, p. 012057). IOP Publishing.
- Endraswara, A. (2016). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Sistem Komputerisasi dengan Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD) pada Usaha Woodhouse* (Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 066-075. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4128>
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. *Musamus Journal Of Public Administration*, 4(2), 066-075.
- Ibrahim, J., & Mutiara, R. (2016). E-Government Implementation in Indonesia: Opportunities and Challenges. *International Journal of Information and Communication Technology Research*, 6(1), 1-7.
- Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2017). E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 170-181.
- Kurniawan, R. (2019). Analisis Penerapan E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 52(1), 9-20.
- Madjid, U. (2011). Ilmu Administrasi Ditinjau Dari Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *Jurnal Visioner*, 5(3), 374–394. <http://eprints.ipdn.ac.id/541/>
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 45–57. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>
- Nasrullah, N. (2017). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance dan Smart City (Studi Kasus: Pemerintah Kota Makassar). *E-JURNAL JUSITI: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, 6(2), 23–31. <https://ejurnal.diponegara.ac.id/index.php/jusiti/article/download/51/50>
- Novriando, A., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Efektivitas “Jogja Smart Service” Terhadap Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 68–75. <https://doi.org/10.31947/jgov.v13i2.8817>
- Putra, M. P., & Permata, T. A. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sari, A. D., & Erawan, Y. A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi E-Government pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(2), 135-149.

- Sari, D. P., & Pratama, D. (2019). Implementasi E-Government di Kabupaten Garut. *Jurnal Sosial Humaniora*.
- Siahaan, H., & Suryadi, K. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E-Government Di Indonesia. *Journal of Informatics, Management and Technology in Healthcare*, 1(1), 9-14.
- Souisa, S. M. H., & Supardal, S. (2022). Implementasi E-Government Pada Sistem Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah (Sisminkada) Daerah Istimewa Yogyakarta Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 6(2), 131–154. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i2.244>
- Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. *Gk Ad*. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/10443/analisis-kebijakan-publik-konsep-teori-dan-aplikasi.html>
- Suprpto, A. (2019). Pengembangan Sistem E-Government pada Pemerintah Daerah sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 79-92.
- Wiranti, N. E., Fitriasia, a., & Ofianto, O. (2020). Implikasi Aksiologi dalam Ilmu Administrasi Negara. *Urnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7361–7367. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9507>
- Yani, N., & Prayitno, B. A. (2021). Analisis Penerapan E-Government dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*.
- Yulianto, A., Arisandy, R., & Hidayatullah, I. (2019). E-Government Implementation in Local Government of Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(12), 1-5.
- Aplikasi E-Government Menuju Good Governance*. (n.d.). <https://sulselprov.go.id/welcome/post/aplikasi-e-government-menuju-good-governance>
- INPRES No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government [JDIH BPK RI]*. (n.d.-b). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147277/inpres-no-3-tahun-2003>
- Lavenda, T. R. (2022). *Implementasi E-Government yang Adaptif untuk Tingkatkan Kualitas Layanan*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tarakan/baca-artikel/15002/Implementasi-E-Government-yang-Adaptif-untuk-Tingkatkan-Kualitas-Layanan.html>
- Rianda, T. A. (2021, December 1). Implementasi Aksiologi bagi Generasi Muda di Era Digital. *Kumparan*. <https://kumparan.com/tasyaalienn Neptune/impl-ementasi-aksiologi-bagi-generasi-muda-di-era-digital-1x0TBLUnwh7>
- Setiawan, E. *Arti kata terap2 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.web.id/terap-2>
- United Nations. (2021). *UN E-Government Survey 2022*. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022>